

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Akuntansi sebagai salah satu
persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh :

FEBRIADY LEONARD SEMBIRING

2007 / 84364

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

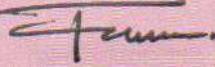
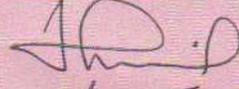
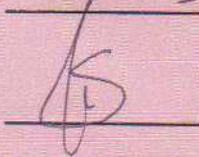
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

Nama : Febriady Leonard Sembiring
NIM/BP : 84364/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2013

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	Drs. Syamwil, M.Pd	
2.	Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
3.	Anggota	Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
4.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	

ABSTRAK

Febriady Leonard Sembiring (2007/84364) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012.

Pembimbing I : Drs. Syamwil, M.Pd

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. 1) pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan keuangan pemerintah daerah, 2) pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah, 3) pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah 48 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *Total Sampling*, sebanyak 48 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data dikumpulkan menggunakan kuisisioner kepada 2 orang staf bagian akuntansi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 20.0 *for Windows*.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa (1) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,546 > 1,995$ yang berarti H_1 diterima. (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,162 > 1,995$ yang berarti H_2 diterima. (3) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,593 > 1,995$ yang berarti H_3 diterima.

Kata Kunci : Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, keandalan dan ketepatanwaktuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademik penulis dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Ketua Prodi dan Bapak Sekretaris Prodi Akuntansi
3. Dosen Penguji: Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si yang telah bersedia menguji dan memberi masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi.

4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Orang tua Siswariadi Sembiring dan Dameria Siregar yang telah memberikan doa, perhatian dan kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Adik-adikku dan adikku Roma Nainggolan yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 dan 2008 yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI ,KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Laporan Keuangan	13
2. Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan	19
3. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	24
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	31
5. Sistem Pengendalian Intern.....	38
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Pengembangan Hipotesis	45
D. Kerangka Konseptual	50
E. Hipotesis Penelitian.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54

A. Jenis Penelitian	54
B. Populasi, Sampel dan Responden	54
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Variabel Penelitian	57
F. Pengukuran Variabel	58
G. Instrument Penelitian	59
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	60
I. Uji Asumsi Klasik	62
J. Teknik Analisis Data	63
K. Definisi Operasional	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	69
B. Demografi Responden	70
C. Deskripsi Hasil Penelitian	72
D. Analisis Deskriptif	74
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	79
F. Hasil Analisis Regresi Berganda	82
G. Pengujian Hipotesis (Uji t)	84
H. Pembahasan	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Keterbatasan Penelitian	94
C. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Opini LKPD Tahun 2010	3
2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2010	4
3. Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang- undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2010.....	5
4. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang.....	55
5. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	58
6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	59
7. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	62
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	71
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	71
11. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	72
12. Statistik Deskriptif	73
13. Distribusi Frekuensi Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	74
14. Distribusi Frekuensi Kualitas Sumber Daya Manusia	76
15. Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Teknologi Informasi	77
16. Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern	78
17. Uji Normalitas Residual.....	80
18. Uji Multikolinearitas	81
19. Uji Heterokedastisitas	82
20. Koefisien Regresi	83
21. Uji F	84
22. <i>Adjusted R Square</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian	99
2. Tabulasi Data Penelitian	104
3. Uji asumsi Klasik	112
4. Uji Hipotesis	114
5. Tabulasi Data Pilot Test	115
6. Hasil Analisi Pilot Test	120
7. Surat Izin Penelitian	
8. Surat Rekomendasi	
9. Surat Izin Pengambilan Data	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:5).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3) Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh: BPK telah memeriksa 158 LKPD Tahun 2010. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 2 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 70 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 14 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 72 entitas. Opini atas 158 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2011 dan 358 LKPD yang telah dilaporkan sebelumnya dalam IHPS I Tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 :Opini LKPD Tahun 2010

OPINI	LHP LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS I 2011		LHP LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS II 2011		Total LHP LKPD Tahun 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	32	9%	2	1%	34	7%
WDP	271	76%	70	44%	341	66%
TW	12	3%	14	9%	26	5%
TMP	43	12%	72	46%	115	22%
Jumlah	358	100%	158	100%	516	100%

Sumber : BPK RI

Dengan demikian selama Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 516 LKPD Tahun 2010 dan 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. BPK telah memberikan opini WTP atas 34 LKPD, opini WDP atas 341 LKPD, opini TW atas 26 LKPD, dan opini TMP atas 115 LKPD.

Perkembangan opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2010 dapat dilihat dalam Tabel 2 dan tabel tersebut diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2010 menunjukkan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Tabel 2 : Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2010

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WDP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516

Sumber : BPK RI

Meskipun sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah menunjukkan perbaikan, sebanyak 27% LKPD masih diberi opini TMP dan TW oleh BPK. Hal ini menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Pada umumnya kelemahan tersebut meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (IHPS II Tahun 2011).

Disamping itu sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Terlambatnya LKPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah mengakibatkan BPK mengalami kesulitan dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah. Adapun LKPD yang terlambat berjumlah 191 dari total 469 pemerintah daerah.

Dengan demikian, hanya 275 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu (IHPS II Tahun 2011)..

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 358 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan 3.397 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.551 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 5,28 triliun sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Tabel 3
Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2010

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rupiah)	%
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	1.197	26,3	376.965,01	7,14
2	Potensi Kerugian Daerah	313	6,88	3.283.343,78	62,17
3	Kekurangan Penerimaan	857	18,83	478.101,00	9,05
4	Administrasi	1.774	38,98	-	-
5	Ketidak hemat / pemborosan / ketidakekonomisan	144	3,16	73.215,37	1,39
6	Ketidakefisienan	2	0,04	1.370,03	0,03
7	Ketidakefektifan	264	5,8	1.068.576,00	20,23

Sumber: www.bpk.go.id-IHPS I Tahun 2011

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (IHPS II Tahun 2011).

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo: 2002 : 146).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003).

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen

yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan

keuangan pemerintah daerah.

Mustafa (2010) melakukan penelitian tentang “ Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari.”Mustafa menemukan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diataslah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat sebuah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”** (Studi Empiris Pemerintah Kota Padang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan tepat menuju sasaran maka pembatasan masalah pada penelitian ini hanya tertuju pada seberapa besar pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana kualitas sumber daya manusia mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

3. Sejauhmana sistem pengendalian intern mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Sejauhmana kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang di ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ;

1. Bagi dinas pemerintah dan pemerintah daerah yang diteliti dapat memberikan masukan untuk mempertimbangkan penerapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern

akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah guna menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

2. Bagi akademisi memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247), mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 paragraf 12, Tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat

komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan arus kas;
4. Catatan atas laporan keuangan

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 00) tahun 2004, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pada masa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005 Lampiran II No 32, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga

dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)
- b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)
- c. Tepat Waktu
- d. Lengkap

2. Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur
- b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)
- c. Netralitas

3. Dapat Dibandingkan

4. Dapat Dipahami

Menurut Lani Sidarta (1995:28) dalam bukunya Sistem Informasi Bisnis: Pengantar Sistem Informasi Bisnis, menyatakan bahwa karakteristik kualitas informasi terdiri atas kemengertian (*understandability*), hubungan (*relevance*), ketepatan waktu (*ketepatanwaktuan*), nilai perkiraan (*predictive value*) dan nilai umpan balik (*feedback value*), keabsahan (*validity*), keakuratan (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), kepastian (*verifiability*), kenetralan

(*neutrality*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan Konsisten (*consistent*).

2. Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Sebagai aspek pendukung keberpautan, Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keandalan/ reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatanwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005:168).

Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Karakteristik kualitas merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Salah satu karakteristik kualitas pokok laporan keuangan adalah keandalan. Sedangkan karakteristik keandalan itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Lampiran II No 35 adalah sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk di sajikan.

b. Dapat di verifikasi

Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan dapat di uji dan apabila pengujian di lakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Agar bermanfaat, informasi harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Menurut IAI (2002) melalui PSAK No. 1 dalam bukunya SAK (2004;12) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatanwaktuan menunjukan rentang waktu antara

penyajian informasi yang diinginkan dengan frekwensi informasi pelaporan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Mamduh (2003: 35) ketepatanwaktu penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus di perhatikan oleh perusahaan. Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat di butuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang.

Oleh karena itu ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi

ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Amey, Gordon dan Narayanan) dalam Respati (2001).

Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yang juga terdapat dalam Hendriksen dan Breda (1992:136), harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna.

Ketepatwaktuan laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (PP No. 24 Tahun 2005). Konstruk nilai informasi ketepatwaktuan diukur dengan indikator:

- a) Timelines; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
- b) Sistematis waktu; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal: laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan.

- c) Sistematis unsur; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur antara unsur-unsur laporan keuangan, yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Chamber dan Penman (1984:2) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara :

1. Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan
2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kapasitas sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kapasitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence, creativity, dan imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya (Ndraha,1997:12). Dalam mengelola SDM, diperlukan sistem pengendalian manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen

informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (*individual goal*). Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara *individual goal* dengan *organization goal*. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya *goal congruence*, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal (Mardiasmo, 2002:50).

Perubahan pendekatan penganggaran dari pendekatan tradisional menuju anggaran berbasis kinerja memerlukan suatu kesiapan dari seluruh organisasi dengan melakukan perencanaan strategik. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Dalam pelaksanaannya, setiap personel atau SDM yang terkait di dalamnya harus memperoleh kejelasan wewenang dan tanggungjawab serta memperoleh pendelegasian wewenang dan tugas. Selain itu, harus didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personel, dan manajemen kompensasi yang jelas dan *fair*. Selanjutnya, agar proses perubahan pendekatan penganggaran tersebut dapat mencapai tujuannya dengan sukses, setiap organisasi juga harus memperhatikan kultur organisasi. Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Perencanaan strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota

organisasi untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Program-program yang sudah dirancang secara baik dapat gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi (Mardiasmo, 2002:57).

Kunci menuju keunggulan kompetitif suatu organisasi, pada dasarnya bersandar pada penggunaan optimal sumber daya manusianya dan pemeliharaan kerjasama antara pengguna jasa dan orang yang diperkerjakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002:37). Tidak mudah menjadikan SDM sebagai sumber keunggulan kompetitif organisasi karena hal itu berkaitan dengan bukan saja faktor kemampuan dan keahlian melainkan berkaitan pula dengan faktor-faktor personal lainnya seperti, nilai yang dianut, persepsi, sikap, personality, dan kemauan individu untuk maju. SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki kemampuan dan keahlian yang khas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan *organizational personality* di mana mereka bekerja.

Kualitas merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kualitas adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkapasitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan rekrutmen, diklat dan non diklat bukan merupakan langkah yang sederhana, disamping memerlukan waktu yang relatif panjang dan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itulah maka diperlukan suatu upaya yang strategis dan sungguh-sungguh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai komponen terkait di pusat dan di daerah, baik yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah ini tidak dapat berjalan secara mandiri tetapi terkait dengan faktor lainnya, seperti: sistem pembukuan, sistem aplikasi teknologi komputer,

inventarisasi aset dan utang, jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran, dan *quality assurance* atas LKPD oleh pengawas internal. Untuk itulah maka pengembangan kualitas SDM ini harus selaras dengan perkembangan faktor tersebut.

Kualitas menurut badan Nasional Sertifikasi Profesi (Noor Fuad & Gofur ahmad, 2009:23) adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Kualitas erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang mempunyai kualitas adalah orang yang memiliki kemampuan sekaligus kewenangan.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa : Kualitas adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, staf harus mempunyai kompetensi untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya.

Kualitas dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari :

1. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup
2. Minimal staf sub bagian penatausahaan keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih

3. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas
4. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah
5. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
7. Telah melaksanakan proses akuntansi
8. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup
9. Dilakukannya pelatihan-platihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas
10. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

b. Karakteristik Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan definisi kualitas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kualitas. Hanya aspek-aspek pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja superiorlah yang merupakan kualitas yang dimilikinya. Oleh karenanya kualitas memiliki karakteristik tertentu.

Spencer & Spencer (Noor Fuad & Gofur Ahmad, 2009: 24) mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kualitas, yakni sebagai berikut:

- a. *Motives*, merupakan konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku dapat dijabarkan dengan istilah tertentu, seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.

- b. *Traits*, adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.
- c. *Self Concept*, merupakan sikap, nilai, atau imajinasi seseorang.
- d. *Knowledge*, merupakan informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlukan dalam pekerjaan.
- e. *Skills*, merupakan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Teknologi Informasi

1) Teknologi

Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*, misalnya) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat

konsisten serta reliabel (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia.

2) Informasi

Menurut Jogiyanto (1995:11), informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut Davis, 2002 (dalam Sidik, 2008) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Menurut Mulyadi (1997:11) Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa informasi meliputi unsur-unsur data, pengelolaan data menambah pengetahuan dan dasar pembuatan keputusan saat sekarang atau masa yang akan datang.

3) Teknologi Informasi

Nugroho (2001:14) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menitikberatkan penggunaan komputer dan teknologi yang berhubungan dengan pengaturan sumber informasi. Selain itu teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memperoleh, memanipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan memanfaatkan data. Definisi ini dibatasi pada teknologi informasi yang didukung oleh komputer. Menurut Gazali, 2004 (dalam Sidik 2008)

mengemukakan keunggulan dan kelemahan dari teknologi, sebagai berikut:

1. Keunggulan Teknologi informasi

a) Tepat waktu dan akurat

Dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer maka hasil outputnya dalam bentuk informasi dapat disajikan tepat waktu dan data yang didapat akurat.

b) Untuk pengambilan keputusan

Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan karena prosesnya cepat.

c) Digunakan untuk berbagai integrasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk integrasi kerja baik itu integrasi vertikal maupun horizontal.

d) Memperoleh informasi yang kompetitif

Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam memperoleh informasi yang kompetitif.

e) Informasi yang bermanfaat

Teknologi informasi menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna dan dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke lokasi lain.

f) Penyajian data cepat

Teknologi informasi mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2. Kelemahan Teknologi Informasi

Kelemahan dari teknologi adalah apabila terjadi suatu kesalahan dalam pengelolaan data akan berakibat fatal bagi informasi yang disajikan. Oleh karena itu harus ada sistem *protection* yang kuat untuk melindungi dokumen-dokumen penting dan adanya pembatasan akses terhadap suatu jaringan. Maka diperlukan orang tertentu yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan dan dibutuhkan biaya yang besar untuk penerapan sistem perlindungan tersebut.

Peran teknologi informasi semakin penting dikarenakan kita sudah memasuki era informasi (*information Age*). Era informasi, komputer digital dan jaringan (*network*) mengubah konsep ekonomi yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga timbul istilah *Digital Network, Economy Network*. Kesuksesan penggunaan teknologi informasi sangat tergantung pada teknologi itu sendiri dan tingkat keahlian yang memadai dari personil EUC (*End – User Computing*) menyebabkan aktivitas EUC yang antara lain berupa pengelolaan data (*Word Processing*), komunikasi elektronik (*Electronic Communication*), dan aktivitas otomatisasi lainnya yang dapat berjalan dengan baik.

Jogiyanto (1995:91) Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, Jaringan

(*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Penerapan sistem informasi seringkali harus menggunakan komputer, begitu pula sistem informasi akuntansi di pemerintahan juga memberikan peranan pada komputer sebagai media untuk meningkatkan nilai informasi akuntansi. Penggunaan komputer mengidentifikasi perlunya penerapan teknologi informasi yang lebih luas. Teknologi informasi mencakup penggunaan *software* dan *hardware* dengan tetap berpegang pada kompleksitas dan kebutuhan sistem.

Warsoko (2007:51) menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama mengapa pengguna komputer sangat penting karena alasan *pertama*, tentang kemampuan komputer untuk mengolah data. Ciri-ciri kemampuan komputer dapat diuraikan sebagai berikut : pengolahan yang tepat, akurasi yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, efektif untuk tugas berulang, dapat berfungsi hampir secara terus menerus, teliti dalam mendeteksi situasi yang menyimpang, dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Alasan *kedua*, komputerisasi sudah tersedia dimana saja dan dapat

diperoleh dengan mudah dengan biaya relatif murah. Namun apabila kemampuan keuangan suatu organisasi telah memungkinkan untuk menyelenggarakan sistem informasi berbasis komputer organisasi tersebut tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan yang mengharuskan pengelolaan data yang cepat, efektif, dan efisien.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sektor Pemerintahan

Menurut Jogiyanto (1995:12) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasar frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Menurut Jogiyanto (1995:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002:214) pemanfaatan teknologi adalah tingkatan integrasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi di sektor pemerintahan terdiri dari, yaitu :

- 1) Bagian akuntansi/keuangan SKPD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja SKPD

- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan pelaporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan pemerintah menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi sektor pemerintahan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya

Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001:89) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

5. Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, Pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah

adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Personel yang kompeten
- b. Pelimpahan tanggung jawab
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
- d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003): (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Pengamanan aset negara.

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komponen pengendalian internal COSO, maka dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP meliputi hal-hal berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia. Unsur manusia merupakan penggerak dan menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai di Inspektorat wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan Inspektorat. Di dalam lingkungan pengendalian yang baik, kemampuan untuk menilai risiko juga akan baik. Inspektorat wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko

pimpinan di Inspektorat menetapkan tujuan pada tingkatan organisasi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian terkait dengan kemampuan untuk memilih jenis pengendalian yang tepat yang dipengaruhi oleh ketepatan dalam menilai risiko. Inspektorat wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Inspektorat. Kegiatan pengendalian terdiri atas *review* kinerja; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi

Unsur-unsur pengendalian yang lain akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang baik. Sistem informasi dan komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di Inspektorat mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, kelompok, dan Inspektorat secara umum dapat dicapai. Inspektorat wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan

informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Inspektorat sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di Inspektorat berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern di Inspektorat adalah dinamis, berubah sesuai tuntutan kondisi. Keseluruhan proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Inspektorat wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan

pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi, dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Secara parsial, hanya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian

intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Mustafa (2010) melakukan penelitian tentang “ Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari.”Mustafa menemukan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mustafa (2010) dengan membedakan obyek penelitiannya. Penelitian Mustafa ini dilakukan di pemerintah kota daerah Kendari , sedangkan penelitian ini dilakukan di pemerintah kota padang.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan

pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004), Dinata (2004).

Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan kurang dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah Kota Palembang. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumberdaya manusianya tidak memiliki kualitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumberdaya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum!tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat

hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah

dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008). Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dan sisi keakuratan ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna. *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly *et al.* (1994) menemukan bahwa system teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik Hal ini boleh jadi dialami juga oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam gala *dinner* bersama Guru Besar Pemasaran, Philip Kotler di Jakarta. Beliau mengakui bahwa bangsa Indonesia masih belum mampu menggunakan secara maksimal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), walaupun teknologi tersebut telah tersedia (ANTARA *News*, 2007). Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain keandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi yang bernama “pemerintah daerah”, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan

data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga diajukan hipotesis:

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat. Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keandalan. Bila dikaitkan

dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan uraian dan temuan empiris tersebut. Dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

D. Kerangka Konseptual

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam

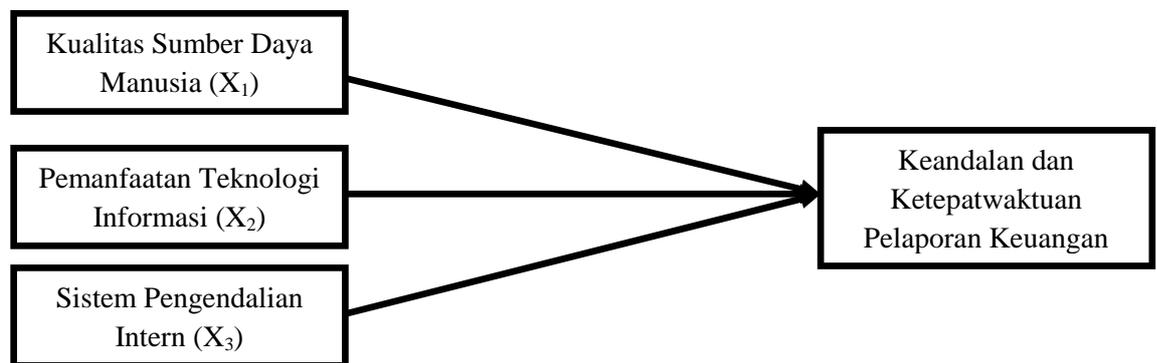
pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Olehkarena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1

Model Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

E. Hipotesis Penelitian

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif

terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

H₄: Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh secara bersama-sama terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Padang.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Padang.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang.
4. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuisioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.
3. Hasil penelitian ini memiliki nilai adjusted R^2 yang rendah. Dengan demikian perlu ditambahkan variabel lain yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai adjusted R^2 .

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan sistem pengendalian intern yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah

daerah yang bernilai informasi dan bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

2. Pada peneliti berikutnya supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuisioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/ Pernyataan yang sama, dan peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
3. Pada penelitian berikutnya supaya dapat memperluas sampel penelitian. Karena penelitian ini hanya meneliti di SKPD Pemerintah Kota Padang. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat diterapkan secara umum di pemerintah daerah lain. Sehingga bagi peneliti berikutnya sebaiknya memperluas sampel dan mengambil sampel di pemerintah daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- BPK RI.2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011*. Didownload dari Situs www.bpk.go.id
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Fariziah. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus KPPN Malang)*. Skripsi S1, Universitas Sumatera utara.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPF, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indriasari, Desi. 2008. “ Pengaruh Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta :BPF UGM.
- Jogiyanto, HM. 1995. *Analisa dan Desain Sistem Informasi :Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offest. Yogyakarta

Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002 .”Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas, Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Akuntan Publik”.*Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No.2

Sidharta, Lani.1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*, Jakarta: PT. ELEX Media Komputindo

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mahmudi. 1997. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Terakayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN

Mustafa,Santiadji.2010. *Analisis Fakto-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*.Kendari:Universitas Haluoleo

Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi :Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPF

- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*.
- Soetanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi pada *Implementasi basis data Program Financial Accounting and Monitoring System (PFAMS)*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisa , Desain, dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi* .Jakarta : Erlangga.
- Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan *Kapasitas SDM* Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Padang, November 2012

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya Saya mendo'akan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu sukses, Amin. Saya adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi pada Universitas Negeri Padang, adapun identitas Saya adalah sebagai berikut:

Nama : Febriady Leonard Sembiring
NIM : 84364
BP : 2007

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kota Padang)”**

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan Saya jaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda *check list* (✓) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini Saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Febriady Leonard Sembiring

KUESIONER
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAGIAN PENDAHULUAN

Identitas Responden

1. Nomor Responden :(diisi oleh peneliti)
2. Nama :
3. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Umur :
5. Tingkat pendidikan : SMA D3 S1
 S2 S3 Lainnya
6. Jabatan :
7. Masa kerja : <5tahun 5-10Tahun >10tahun

BAGIAN ISI

Pada setiap item kuesioner, tunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibu sangat setuju terhadap pernyataan. Berikanlah tanda ceklis (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

- SS = Sangat Setuju
S = Setuju
RR = Ragu-Ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

DAFTAR PERTANYAAN

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Subbagian keuangan/akuntansi memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup					
2	Minimal staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi					
3	Subbagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas					
4	Tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah					
5	Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya					
6	Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi					
7	Subbagian keuangan/akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi					
8	Subbagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup					
9	Pelatihan-Pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas					
10	Dana-Dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan					

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Subbagian keuangan/akuntansi memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas					
2	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja secara <i>Local Area Network (LAN)</i> atau <i>Wide Area Network (WAN)</i>					
3	Jaringan Komputer terpasang dan telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi					
5	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					

6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi					
7	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur					
8	Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya					

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No.	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Instansi memiliki kode etik tertulis dan semua aparat mengetahuinya.					
2	Adanya contoh dari pimpinan untuk berperilaku etis dengan mengikuti kode etik.					
3	Satuan pengawasan intern terdiri dari staf yang kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan perubahan.					
4	Pembagian tugas dan jabatan terstruktur dengan baik.					
5	Adanya metode penilaian/pengukuran resiko dan sistem informasi manajemen resiko.					
6	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi resiko.					
7	Adanya pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko.					
8	Adanya penetapan kebijakan pemisahan tugas yang memadai.					
9	Adanya otorisasi yang sesuai dan memadai atas aktivitas.					
10	Adanya pemeriksaan yang independen terhadap kinerja.					
11	Adanya identifikasi dan pengkomunikasian informasi agar tanggungjawab dapat dilaksanakan.					
12	Adanya sistem informasi yang berfungsi dengan baik dapat membantu meyakinkan bahwa tanggung jawab telah dilaksanakan.					
13	Adanya pengawasan secara terus menerus dan periodik.					
14	Adanya pengawasan untuk menilai kualitas pengendalian intern.					

KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

NO	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Informasi laporan keuangan telah disajikan secara jujur dan wajar					
2	Informasi laporan keuangan yang telah disajikan dapat diuji kebenarannya					
3	Apabila informasi dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh					
4	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu					
5	SKPD mampu menyajikan unsur-unsur laporan keuangan secara lengkap					

KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN

NO	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Informasi laporan keuangan telah disajikan dengan tepat waktu					
2	Informasi laporan keuangan yang telah dihasilkan telah tersedia ketika dibutuhkan pemakai laporan keuangan					
3	Laporan-laporan seperti : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sering disediakan secara sistematis dan teratur					

Terima Kasih

Atas Perhatian dan Partisipasi Bapak/Ibu